

## **BAB II**

### **KONFLIK DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH DAN KSBG**

Republik Afrika Tengah mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak dampak yang ditimbulkan dari konflik yang terjadi salah satunya adalah kekerasan seksual berbasis gender. Dalam usaha untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual berbasis gender yang terjadi di Republik Afrika Tengah, dilakukan kerjasama antara negara-negara dan organisasi-organisasi internasional dimulai pada tahun 2013. Yang terjadi justru kasus kekerasan seksual berbasis gender semakin meningkat setiap tahunnya selama konflik tersebut berjalan.

Bagian pertama dari Bab ini akan menjelaskan secara singkat bagaimana konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Bagian kedua akan dilanjutkan dengan kasus kekerasan seksual berbasis yang terjadi pada tahun 2013 sampai 2016. Dalam bagian kedua akan dipaparkan data-data mengenai peningkatan kasus kekerasan seksual berbasis gender serta akan dijelaskan beberapa kasus kekerasan seksual berbasis gender yang terjadi selama periode tahun 2013-2016. Dalam bagian kedua ini juga akan diberikan gambaran apakah kekerasan seksual berbasis gender ini ada sebelum konflik tersebut pecah pada tahun 2013. Kemudian bagian ketiga akan dijelaskan respon internasional menanggapi konflik dan kekerasan seksual berbasis gender di Republik Afrika Tengah.

#### **2.1 Gambaran Konflik di Republik Afrika Tengah**

Republik Afrika Tengah merupakan negara yang dibatasi oleh Chad di utara, Sudan dan Sudan Selatan di utara dan timur, Republik Demokratik Kongo ((DRC), Kongo-Kinshasa) dan Republik Kongo (Brazzaville) di selatan, dan Kamerun di barat. Ibukotanya, Bangui, terletak di perbatasan selatan, dibentuk oleh Sungai Ubangi, anak sungai Kongo (Dukhan N. , 2016).

Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah bermula pada awal kemerdekaan. Negara tersebut merdeka pada tahun 1960 dan konflik berjalan hingga tahun 2007. Situasi di Republik Afrika Tengah memburuk pada tahun 2013 karena destabilisasi mantan rezim Presiden Francois Bozizé sejak Desember 2012 hingga digulingkan oleh kelompok pemberontak Seleka pada Maret 2013. Sejak

saat itu, Republik Afrika mengalami krisis berkepanjangan. Situasi semakin memburuk dengan adanya serangan pada 5 Desember 2013 di Bangui dan kekerasan besar-besaran yang terjadi sesudahnya (Dukhan N. , 2016).

Pada tahun 2013 setelah serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak Seleka, Presiden Bozizé dan koalisi Seleka menandatangani Perjanjian Libreville untuk membentuk Pemerintah Kesatuan Nasional. Para pemberontak Seleka melakukan kudeta, mengambil alih ibukota, dan pindah ke bagian barat negara itu. Yang menyebabkan Bozizé melarikan diri ke Kamerun. Michel Djotodia, pemimpin koalisi Seleka, memproklamkan dirinya sebagai presiden, membubarkan Pemerintah Kesatuan Nasional dan Majelis Nasional, membekukan konstitusi dan mengumumkan bahwa ia akan memerintah dengan dekrit setidaknya selama tiga tahun. Selama periode ini, pejuang Seleka melakukan pelanggaran terhadap penduduk sipil, termasuk pembunuhan, penjarahan, perkosaan dan pemindahan paksa (Dukhan N. , 2016).

Adanya tekanan dari Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Tengah (ECCAS), Dewan Transisi Nasional didirikan dan memilih Michel Djotodia, kandidat tunggal, sebagai Kepala Transisi. Pemerintahan Persatuan Nasional yang baru dibentuk. Michel Djotodia tetap menjadi Menteri Pertahanan dan Presiden Transisi. Michel Djotodia secara resmi dilantik sebagai Kepala Negara Transisi dan berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilihan nasional dalam waktu 18 bulan. Presiden Djotodia secara resmi membubarkan koalisi Seleka, tetapi pengumuman politik ini tidak memiliki efek nyata dalam hal mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemberontak Seleka dan pendukung mantan Presiden Bozizé.

Pada akhir tahun 2013, Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSC) 2127 mengesahkan pengiriman Misi Dukungan Internasional yang dipimpin Afrika ke Republik Afrika Tengah, yang dikenal sebagai MISCA, untuk menstabilkan Republik Afrika Tengah, bersama pasukan Prancis, Operasi Sangaris, terdiri dari 2.000 tentara. Pelecehan yang dilakukan oleh para pejuang Seleka memicu serangan dari kelompok-kelompok pertahanan diri yang terorganisir yang dikenal sebagai anti-Balaka. Berlawanan dengan pemerintahan Seleka, milisi anti-Balaka

melakukan pembalasan berskala besar terhadap warga sipil terutama Muslim, memberikan konflik dimensi sektarian. Kekerasan yang dihasilkan membunuh ribuan warga sipil dan menyebabkan ratusan ribu orang mengungsi. Kelompok anti-Balaka mengkoordinasi serangan ganas terhadap penduduk Muslim di ibukota, tempat lebih dari 1.000 warga sipil tewas (Dukhan, 2016).

Serangan yang terjadi pada 5 Desember 2013 yang dilakukan oleh milisi anti-Balaka di Bangui dan Bossangoa menyebabkan total 902.000 orang di Republik Afrika Tengah mengungsi. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan seperti pembunuhan dan membuat cedera, kekerasan seksual. Serangan itu juga memprovokasi perpindahan hampir 500.000 pengungsi di seluruh negeri dalam waktu satu bulan yang sebagian besar dari mereka berada di Bangui (OCHA, 2014). Kejadian-kejadian ini memicu deklarasi darurat Tingkat 3 antar-lembaga untuk Republik Afrika Tengah pada 11 Desember, diikuti oleh penyebaran Koordinator Kemanusiaan Senior dan peningkatan kapasitas operasional oleh sebagian besar organisasi kemanusiaan untuk memastikan tanggapan yang kuat. Selanjutnya, *Multi-Cluster Initial Rapid Assessment* (MIRA) dilakukan di lima prefektur yang paling terkena dampak di Bangui dan barat laut. Pengunduran diri Presiden Michel Djotodia pada 10 Januari, dan Perdana Menteriya, Nicolas Tiangaye meninggalkan negara itu dengan kekosongan kekuasaan.

Setelah Michel Djotodia mengundurkan diri, siklus pembalasan terhadap Muslim meningkat di Bangui dan di barat daya negara itu. Serangan yang dilakukan oleh milisi anti-Balaka memaksa puluhan ribu Muslim untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga. Sementara itu, pasukan Seleka mundur ke timur dan beberapa lainnya kembali ke Sudan atau Chad. Sementara kelompok anti-Balaka menduduki wilayah utara dan barat negara itu dan meningkatkan serangan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil dari komunitas Muslim dan terhadap individu yang dikenal atau dianggap sebagai pendukung mantan Séléka di Bangui dan di bagian barat negara itu. Sebuah operasi militer Uni Eropa di Republik Afrika Tengah diturunkan atas izin dari DK PBB dalam Resolusi 2134 pada tahun 2014 (United Nations, 2017). EUFOR Republik Afrika Tengah terdiri dari 1.000 pasukan dan bertujuan untuk memberikan dukungan sementara untuk mencapai

lingkungan yang aman dan terjamin di Bangui. Karena kekerasan yang terjadi semakin meningkat, Dewan Keamanan PBB pada September 2014 menurunkan pasukan penjaga perdamaian yang diberi nama *UN Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in CAR* atau MINUSCA dan mendesak negara itu untuk menyelenggarakan pemilihan sesegera mungkin dan tidak lebih dari Februari 2015 (United Nations, 2017).

Sebuah operasi militer Uni Eropa di Republik Afrika Tengah diturunkan atas izin dari DK PBB dalam Resolusi 2134 pada tahun 2014. EUFOR Republik Afrika Tengah terdiri dari 1.000 pasukan dan bertujuan untuk memberikan dukungan sementara untuk mencapai lingkungan yang aman dan terjamin di Bangui (United Nations, 2017). Karena kekerasan yang terjadi semakin meningkat, Dewan Keamanan PBB pada September 2014 menurunkan pasukan penjaga perdamaian yang diberi nama *UN Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in CAR* atau MINUSCA dan mendesak negara itu untuk menyelenggarakan pemilihan sesegera mungkin dan tidak lebih dari Februari 2015.

Selama kekosongan pemerintahan yang terjadi di Republik Afrika Tengah, negara tersebut dinaungi oleh Presiden Republik Kongo Denis Sassou Nguesso. Presiden yang berkuasa menandatangani Perjanjian Brazzaville tentang penghentian permusuhan. Kekerasan dan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Bangui dan sekitarnya menjadi pembicaraan dunia internasional yang kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mengadakan Forum Bangui pada bulan Januari 2015 yang diadakan dengan harapan dapat menangani permasalahan rekonsiliasi nasional. Konflik yang terjadi menyebabkan perpecahan internal dan adanya persaingan untuk menguasai sumber daya alam yang ada membuat kelompok pemberontak Seleka mulai terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan / atau partai politik.

Kemudian negosiasi terjadi antara milisi anti-Balaka yang diwakili oleh Joachim Kokate dan sebuah faksi mantan-Seleka (*Front Populaire la Renaissance de Centrafrique, FPRC*) yang diketuai oleh Nourredine Adam dan Michel Djotodia di Nairobi, yang menghasilkan penandatanganan Perjanjian Nairobi. Perjanjian yang dimediasi oleh Denis Sassou Nguesso berisi tentang ketentuan demobilisasi,

perlucutan senjata dan reintegrasi, amnesti untuk semua pelaku pelanggaran dan pemindahan otoritas transisional. Otoritas transisional Republik Afrika Tengah dan komunitas internasional menolak perjanjian tersebut karena mereka tidak dilibatkan dalam proses negosiasi dan perjanjian tersebut merusak perjanjian yang ada.

Forum Rekonsiliasi Bangui diselenggarakan dan 600 peserta menyetujui serangkaian rekomendasi seputar empat tema: perdamaian dan keamanan, keadilan dan rekonsiliasi, pemerintahan dan pembangunan ekonomi dan sosial. Kekerasan yang terjadi di Bangui menyebabkan terbunuhnya 79 warga sipil dengan 512 luka-luka. Presiden Transisi, Catherine Samba-Panza, menuduh “Nairobists” mencoba untuk mengatur kudeta terhadap pemerintahan transisi dan mencoba melemahkan proses pemilu. Pemilihan umum yang awalnya direncanakan akan berlangsung pada 13 Oktober secara resmi ditunda. Di bawah tekanan internasional, pemerintah negara akhirnya mengumumkan bahwa referendum mengenai konstitusi akan berlangsung pada 13 Desember dan pemilihan presiden dan legislatif masing-masing pada 27 Desember dan 31 Januari 2016. Menjelang pemilihan umum, kekerasan meningkat di Bangui dan di bagian lain dari negara tersebut (Conciliation Resources, 2016).

Sejak kemerdekaannya, Republik Afrika Tengah telah mengalami periode ketidakstabilan politik yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan penduduknya. Perempuan di Republik Afrika Tengah adalah korban utama krisis politik dan ekonomi yang dialami di negara ini. Ketidaksetaraan gender yang mencolok seperti kurangnya akses ke layanan kesehatan, pendidikan dan sosial adalah kenyataan sehari-hari yang harus dihadapi mayoritas perempuan di Republik Afrika Tengah. Kemiskinan dan kekerasan terhadap perempuan tersebar luas dan terjadi di seluruh wilayah negara ini.

Praktek sosial, budaya, hukum dan kebijakan negara membatasi peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan membatasi peluang ekonomi mereka. Hambatan ini termasuk kurangnya pendidikan, kurangnya akses ke pinjaman kredit, pengetahuan yang terbatas mengenai perdagangan dan kurangnya inisiatif bersama untuk membuat suara mereka didengar. Pengetahuan masyarakat sipil yang terbatas dan kapasitas rendah

membuat sulitnya untuk membuat rencana pembangunan dan pelaksanaannya. Selain itu, perempuan di Republik Afrika Tengah kekuarangan pemimpin yang jelas dalam pemerintahan dan masyarakat sipil untuk bertindak sebagai juru bicara untuk kebutuhan perempuan di negara tersebut.

## **2.2 Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Republik Afrika Tengah**

Republik Afrika Tengah menempati peringkat 149 dari 155 negara dalam Indeks Kesetaraan Gender menurut PBB, menjadikannya salah satu negara terburuk untuk menjadi seorang perempuan (UN Women, 2016). Kesenjangan besar yang ada antara pria dan wanita berkontribusi pada budaya penerimaan semua bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan terhadap pasangan, kekerasan seksual, dan pernikahan anak. Menurut *Multiple Indicator Cluster Survey* pada tahun 2010, lebih dari 70% pria melaporkan bahwa kekerasan fisik terhadap wanita adalah “normal”. Perkosaan dalam pernikahan tidak diakui secara sosial atau hukum dan beberapa komunitas percaya bahwa seks paksa dengan gadis yang tidak perawan adalah bukan merupakan bentuk pemerkosaan. Pada tahun 2011, UNHCR melaporkan tingginya angka pernikahan anak, khususnya di antara komunitas-komunitas pengungsi di utara, di mana gadis-gadis muda dinikahkan dengan imbalan hadiah. Gadis-gadis yang sudah menikah ini sering melahirkan banyak anak sebelum sistem reproduksi mereka sepenuhnya matang. (UNHCR, 2011)

Menurut UNHCR, Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) merupakan tindakan apa pun yang dilakukan terhadap seseorang dan didasarkan pada norma-norma gender dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Kekerasan ini dapat bersifat fisik, emosional, psikologis, atau seksual, dan dapat mengambil bentuk penolakan sumber daya atau akses ke layanan (UNHCR, 2018). Kekerasan Berbasis Gender adalah istilah umum bagi setiap tindakan yang berbahaya yang dilakukan di luar keinginan seseorang, dan bahwa hal ini berdasarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan Berbasis Gender melanggar sejumlah hak asasi manusia universal yang dilindungi oleh berbagai peraturan dan konvensi internasional. Banyak – tetapi tidak semua – bentuk dari Kekerasan Berbasis Gender adalah ilegal dan merupakan tindakan kriminal seperti yang diatur dalam hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan satu negara (UNFPA, 2005).

Kekerasan seksual terhadap warga sipil adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia di banyak situasi konflik dan krisis. Seringkali pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang dengan tujuan untuk menyiksa dan mempermalukan para korban dan keluarga mereka, untuk menghancurkan masyarakat dan mendemoralisasi musuh. Dengan demikian, kekerasan seksual selalu merupakan tindakan dominasi, didasarkan pada persepsi budaya tentang apa yang merupakan identitas maskulinitas dan feminitas. Perempuan dan anak-anak merupakan sebagian besar korban kekerasan seksual. Pria juga menjadi korban kekerasan seksual, meskipun jumlahnya lebih sedikit. Sebanyak 85 kasus KSBG ditemukan terhadap laki-laki dan 35 kasus terhadap anak laki-laki (All Survivors Project, 2018). Banyak dari korban mengalami trauma dan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Hal yang sama juga dirasakan oleh anak-anak yang lahir setelah perkosaan, mereka dikucilkan dari masyarakat bahkan dari keluarga.

Kekerasan seksual bukan hanya fenomena perang, namun sering terjadi ketika konflik tersebut belum terjadi dan setelah konflik tersebut selesai. Kekerasan seksual berbasis gender selama dan setelah konflik, membentuk kontinuitas. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mengakui bahwa setiap bentuk kekerasan seksual berbasis gender mencerminkan dan melanggengkan status perempuan sebagai masyarakat “kelas dua”, khususnya mengenai cara tubuh perempuan dipandang dan dikendalikan, dan secara intrinsik terkait dengan hubungan gender yang tidak setara.

### **2.2.1 Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Republik Afrika Tengah sebelum Konflik**

Kekerasan seksual berbasis gender di Republik Afrika Tengah sudah terjadi sebelum konflik tersebut pecah pada tahun 2013. Kekerasan banyak terjadi di daerah sekitar Ouaka, Basse-Kotto dan Haute-Kotto. Konflik yang terjadi selama beberapa bulan pertama tahun 2003 antara pendukung yang setia kepada Patassé dan pendukung Bozizé menyebabkan terjadinya ratusan kasus kekerasan seksual berbasis gender, dan pelanggaran lain terhadap hukum hak asasi manusia internasional dan hukum humaniter internasional, serta terdapat 205.000 pengungsi (United Nations, 2017).

Dari banyak kasus yang terjadi di Republik Afrika Tengah, pada September 2003 terjadi pemerkosaan yang meluas dan sistematis yang dilakukan oleh para militer. Amnesty Internasional melaporkan bahwa korban yang mengalami pemerkosaan pada akhir tahun 2002 dan awal 2003 lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya namun dengan spesifikasi dan skala yang tidak jelas. Dari Januari hingga Maret 2003, kelompok pendukung Bozizé memperkosa sejumlah wanita dan gadis. *Fédération internationale des droits de l'Homme* (FIDH) mendokumentasikan 293 kasus pemerkosaan selama periode ini, yang mana 21 (7 persen) dilaporkan telah dilakukan oleh pasukan Bozizé. (FIDH, 2005). Banyak korban pemerkosaan yang tidak melapor karena adanya stigma “diam” dan adanya penolakan di masyarakat yang akan mereka terima sehingga sebagian besar korban enggan – kebanyakan tidak mau – untuk berbicara di depan umum, diperkirakan ada ratusan orang yang belum melapor karena stigma yang ada (All Survivors Project, 2018). Anak perempuan umur 8 tahun dan wanita umur 60 tahun diperkosa didepan suami, anak-anak atau orang tua mereka. Beberapa kerabat keluarga yang berusaha mencegah serangan dibunuh sementara yang lain diancam. Berikut ini akan dilampirkan peta wilayah terjadinya KSBG di RAT.



**Gambar 2.1 Peta Wilayah KSBG di RAT**



Sumber: *Human Rights Watch*

Pada gambar 2.1 di atas merupakan peta penyebaran wilayah terjadinya kekerasan seksual di Republik Afrika Tengah. Kekerasan seksual yang terjadi sangat meluas bahkan di wilayah yang tidak mengalami konflik. Pada bulan Juni dan Juli 2009, di empat wilayah yang tidak mengalami konflik (Bangui, Bouar, Bambari, dan Bangassou) satu dari tujuh wanita melaporkan telah diperkosa pada tahun lalu, dan memungkinkan pemerkosaan yang sebenarnya terjadi mungkin lebih tinggi. Selain itu, dari bulan Februari hingga November, sebuah LSM internasional melaporkan 128 kasus kekerasan berbasis gender di ana Gribizi dan Provinsi Ouham Pende. Lapornya termasuk pemerkosaan pria dan wanita, serta pemerkosaan geng. Dalam 27 kasus, korban mengetahui pelaku dan, dalam 18 kasus, pelaku bersenjata. Dari 128 kasus ini, dua korban mengidentifikasi anggota APRD (*Popular Army for the Restoration of the Republic*) sebagai pelaku, satu penyerang adalah anggota FACA (*Central African Armed Forces*), dan satu dari entitas bersenjata yang tidak ditentukan. Menurut LSM, hanya tiga dari 128 kasus yang dibuat upaya untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku. Dalam salah satu dari tiga kasus ini, pemimpin desa melaporkan insiden itu ke polisi militer, dan kasus ini masih dalam penyelidikan pada akhir tahun. Dalam dua kasus lainnya, anggota keluarga yang mencambuk masing-masing pelaku 150 cambukan masing-

masing dan satu orang didenda 250.000 CFA (\$ 500) (Bureau of Democracy, Human Rights, and Labour, 2011).

Di Republik Afrika Tengah, kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap wanita adalah hal biasa. Pada tahun 2009, dilaporkan bahwa 25 persen wanita yang disurvei pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pasangan mereka sendiri. Dari mereka, 33 persen pria dan 71 persen wanita mengatakan bahwa mereka dapat menggunakan kekerasan terhadap wanita ketika wanita tidak melakukan tugas rumah tangga dengan benar. (UNICEF, 2014) Menurut AWJ (*Association of Women Jurists*) sebuah LSM yang berada di Bangui dan bergerak dalam membela hak-hak perempuan dan anak-anak, korban kekerasan dalam rumah tangga jarang melaporkan insiden kepada pihak berwenang. Ketika insiden ditangani, itu dilakukan dalam keluarga atau komunitas lokal.

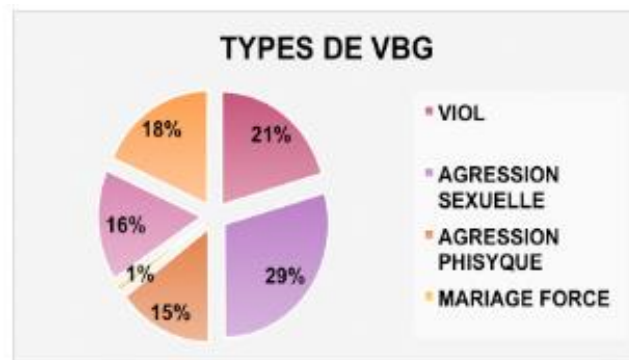
### **2.2.2 Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Republik Afrika Tengah saat Konflik**

Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2013 dimana pada tahun 2013 hanya terjadi 571 kasus saja. Menurut laporan Dewan Keamanan PBB tentang kekerasan seksual terkait konflik selama periode pelaporan Januari hingga Desember 2014, 2.527 kasus kekerasan seksual terkait konflik didokumentasikan di Republik Afrika Tengah, termasuk pemerkosaan yang dilakukan untuk men teror warga sipil, dengan banyak warga sipil menjadi korban (United Nations, 2017). Warga sipil di rumah mereka, selama pencarian dari rumah ke rumah dan saat berlindung di ladang atau semak-semak. Data dari *CAR Multi-Cluster / Sector Initial Rapid Assessment* melaporkan bahwa dari semua insiden kekerasan yang menargetkan perempuan, diperkirakan bahwa perkosaan adalah bentuk yang paling umum, mewakili 44% dari semua insiden, sementara kekerasan fisik menyumbang 36% insiden. Angka serupa diberikan untuk insiden yang mempengaruhi anak perempuan, dengan 40% insiden berupa perkosaan, 23% kekerasan fisik, dan 6% eksekusi. Pelaku dari insiden ini sebagian besar adalah kelompok bersenjata. (OCHA and WFP, 2014)

Sedangkan pada tahun 2015, antara Januari dan Oktober 2015, *the Gender Based Violence Information Management System (GBVIMS)* bahwa sejak 2014, tercatat bahwa terdapat 60.208 korban kekerasan seksual berbasis gender yang

menerima setidaknya perawatan medis atau perawatan psikososial sesuai dengan kebutuhan mereka (GBVIMS, 2015). Tabel 2.2 menjelaskan mengenai presentase kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2015. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 dimana pada tahun 2014 hanya terjadi 2.572 kasus KSBG. Data selengkapnya disajikan dalam grafik 2.1.

**Grafik 2.1 Jumlah Korban KSBG Tahun 2015**



Graphique 1: les 06 types principaux des VBG entre Janvier et Octobre 2015, selon le GBVIMS de la RCA

Sumber: *GBVIMS*

Dari tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa kasus KSBG naik secara drastis pada tahun 2015 bahkan mengalami kenaikan sebesar lebih dari sepuluh kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Jenis yang paling umum adalah penyerangan seksual yaitu sebanyak 17.697 kasus dengan persentase 29%, diikuti oleh pemerkosaan terjadi sebanyak 12.376 kasus dengan persentase 21%, dan jenis kekerasan psikologis emosional sebanyak 11.015 kasus dengan persentase 18%. Kemudian adanya penolakan akses terhadap sumber daya, peluang atau layanan yang berjumlah 9.553 kasus, persentase 16%; serangan fisik 8.937, persentase 15%; dan yang terakhir terdapat 630 kasus pernikahan paksa, persentase 1% (GBVIMS, 2015).

Pada awal tahun 2016, sebuah pemerintahan baru dipilih secara demokratis di Republik Afrika Tengah, namun situasi keamanan tetap bergejolak di sebagian besar wilayah negara tersebut. Beberapa wilayah hancur oleh bentrokan di paruh kedua tahun ini, yang menyebabkan pemindahan ribuan warga sipil dan pola

kekerasan seksual terkait konflik yang bersifat etnis dan sektarian. MINUSCA melaporkan bahwa terdapat 179 kasus kekerasan seksual terkait konflik yang terutama dilakukan oleh elemen eks-Séléka, anti-balaka dan *Révolution et Justice* dan oleh *Lord's Resistance Army*. Kejadian-kejadian ini termasuk 151 perkosaan, 54 diantaranya adalah pemerkosaan geng, serta enam pernikahan paksa dan empat kasus perbudakan seksual (Secretary General, 2017). Berikut ini adalah tabel jumlah total korban KSBG pada tahun 2016.

**Tabel 2.1 Jumlah Total Korban KSBG Tahun 2016**

Jumlah Total Korban KSBG Tahun 2016			Jumlah Korban berdasarkan Kelompok Umur		
KSBG	8.797	79%	Minor 0-11 Tahun	403	3%
Kekerasan Seksual	2.313	21%	Minor 12-17 Tahun	1.477	14%
Total	11.110	100%	Dewasa	9.230	83%
			Total	11.110	100%

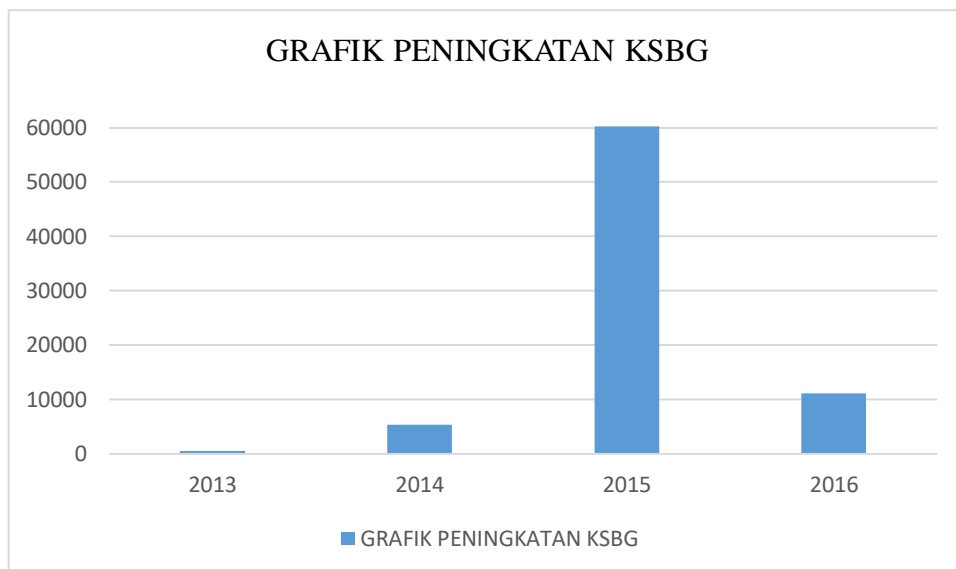
Sumber: *Rapport Annuel des Incidents de VBG 2016*

Pada tabel 2.1 menunjukkan total korban yang mengalami KSBG yang terjadi dalam 179 kasus tersebut mencapai 11.110 kasus antara Januari dan Desember 2016. Dari jumlah tersebut 8.797 kasus merupakan KSBG atau sebesar 79% dan 2.313 merupakan kasus kekerasan seksual atau sebesar 21%. Dari kasus yang dilaporkan ini, 86% adalah perempuan (perempuan dan anak perempuan) dan 14% adalah laki-laki dengan umur yang berbeda (GBVIMS, 2016).

Namun konflik masih tetap terjadi, 14 kasus kekerasan seksual dilakukan oleh elemen eks Séléka dan *Révolution et Justice*, serta oleh pasukan anti-balaka, melawan korban yang berkisar dari 14 hingga 40 tahun. Di Kaga Bandoro, beberapa kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan geng, diduga dilakukan oleh para pejuang Fulani bersenjata selama bentrokan pada 12 Oktober. Setidaknya 25 persen dari 1.685 kasus kekerasan seksual yang tercatat di seluruh negara oleh lembaga kemanusiaan terjadi di Kaga Bandoro, di mana perempuan melaporkan bahwa kekerasan seksual digunakan oleh elemen-elemen mantan-Séléka untuk

merendahkan dan mengganggu kestabilan masyarakat. Pada pertengahan 2016 di Ngaounday, unsur-unsur bersenjata, dilaporkan dari Chad, memerkosa 19 wanita dan gadis dalam satu malam selama serangan di beberapa desa. *The Lord's Resistance Army* melanjutkan pola penculikan, perkosaan, pernikahan paksa, impregnasi paksa, dan perbudakan seksual selama satu dekade. Kasus kekerasan seksual terkait konflik yang dilakukan oleh anggota Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda, yang berbasis di Obo sebagai bagian dari operasi melawan LRA, juga didokumentasikan pada tahun 2016 (Secretary General, 2017). Berikut ini akan dilampirkan grafik peningkatan KSBG dari tahun 2013-2016.

**Grafik 2.2 Jumlah Korban KSBG dari Tahun 2013-2016**



Pada grafik 2.2 tersebut terlihat peningkatan secara drastic dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Namun jumlah yang menurun dari tahun 2015 disebabkan oleh adanya inisiasi perdamaian yang dilakukan pemerintah dengan PBB (United Nations, 2017).

### **2.3 Respon Internasional terhadap KSBG di Republik Afrika Tengah**

Sejak awal terjadinya konflik di Republik Afrika Tengah, negara-negara dan organisasi internasional telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai macam bantuan telah diturunkan untuk membantu

mereka. Namun konflik terus terjadi yang berdampak tidak hanya domestik namun juga negara-negara di sekitarnya.

Untuk menanggapi KSBG di Republik Afrika Tengah, UNICEF dalam *Country Programme Document (CPD)* menjalankan program dari tahun 2012-2016. Di bawah CPD ini, UNICEF Republik Afrika Tengah bekerja dalam enam bagian: Kesehatan dan Nutrisi (khususnya Kelangsungan Hidup dan Pengembangan Anak), WASH, Pendidikan (khususnya Pendidikan Dasar dan Paritas Gender), Perlindungan Anak, Perencanaan Kebijakan Sosial dan M & E, dan Komunikasi untuk Pembangunan (C4D) (UNICEF, 2016).

Selain itu juga terdapat program yang dikelola GBVIMS pada tahun 2014 di tingkat antar-organisasi oleh komite yang terdiri dari: UNHCR, UNICEF, UNFPA dan IRC. UNFPA sebagai pemimpin, dan sejak Juli 2016, 8 organisasi menandatangani protokol pembagian informasi (OCHA, 2014). Meningkatnya kekerasan dan kebutuhan bantuan kemanusiaan di Republik Afrika Tengah, membuat perhatian internasional juga meningkat terhadap konflik tersebut, termasuk dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB yang disetujui pada tanggal 5 desember yang menugaskan penggelaran tentara Prancis dan Afrika ke Republik Afrika Tengah dan memberikan mandat 12 bulan untuk misi dukungan internasional yang dipimpin Afrika (MISCA) (Global Protection Cluster, 2013).

Pada tahun 2014, bantuan kemanusiaan UNICEF berfokus pada identifikasi populasi yang paling rentan, menilai kebutuhan mereka dan memberikan tanggapan berdasarkan Komitmen Inti untuk Anak (CCC). Pada tahun 2014, 55 staf dikerahkan ke enam lokasi strategis untuk respons kemanusiaan yang efektif (Bouar, Bossangoa, Kaga Bandoro, Bambari, Ndele dan Zemio). Melengkapi ini, tim mobile juga dikerahkan untuk mempercepat respons, mengidentifikasi, menyelesaikan kendala, dan melindungi. Situasi domestik yang tidak stabil membuat akses menjadi lebih sulit, UNICEF RAT bekerjasama dengan MINUSCA, pasukan internasional dan berbagai kelompok bersenjata untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak-anak untuk mendapatkan akses kemanusiaan (UNICEF, 2014). Dari 2014-2015, *GBV SC* bekerjasama dengan Mercy Corps, UNICEF, UNFPA dan IRC menjalankan sesuai dengan rencana

kerja, di mana kegiatan-kegiatannya termasuk: Penyediaan kesehatan, psikososial (termasuk dukungan sosio-ekonomi) dan tanggapan hukum untuk korban kekerasan seksual, dukungan untuk kelompok wanita, sensitisasi masyarakat terkait dengan KSBG, sensitisasi terhadap polisi terkait dengan KSBG (UNICEF, 2016).

Layanan perlindungan anak diperluas sebagai respon terhadap krisis kemanusiaan. Lebih dari 2.800 anak-anak berusia 7-17 tahun (termasuk 646 perempuan) dibebaskan dari kelompok bersenjata pada tahun 2014, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya 196 anak-anak. Dengan pembukaan *National Listening Centers*, 2.287 orang yang selamat dari KSBG dan mengakses dukungan psikologis, bantuan medis dan peralatan kebersihan. Akhirnya, 558 anak yang terpisah dan tanpa pendamping dipertemukan dengan keluarga mereka. (UNICEF, 2014). IRC juga menjadi salah satu badan bantuan yang menyediakan layanan, termasuk konseling dan rujukan medis kepada perempuan dan korban kekerasan di CAR. Sejak membuka dua pusat wanita di awal tahun 2014 di Bangui, IRC telah membantu 125 wanita pulih dari kekerasan, termasuk 10 anak perempuan, dengan yang termuda masih berusia tujuh tahun. Dari jumlah tersebut, 70 persen telah selamat dari pemerkosaan dan 84 persen telah diperkosa (IRC, 2014).

Buku-buku panduan pengembangan kapasitas pelatihan telah dikembangkan untuk para penegak hukum tentang cara menangani kasus-kasus KSBG. Buku ini dikembangkan bersama Kementerian Keamanan Publik, Departemen Kehakiman, Polisi Nasional, *gendarmerie*, aktor masyarakat sipil, dan aktor utama dari *Sub-Cluster* KSBG. Pelatihan dilakukan secara manual oleh polisi dengan alat untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada korban dalam penyelidikan mereka. Pelatihan juga diberikan untuk mendidik pasukan keamanan tentang perlunya kepekaan, kerahasiaan, non diskriminasi dan penghormatan terhadap hak, martabat dan harapan pada korban KSBG. (UNDP, 2018)

Dalam mengidentifikasi perdagangan orang di sepanjang perbatasan negara, IOM bekerjasama dengan UNPOL untuk melatih para pejabat sektor keamanan dan keadilan. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat sistem rujukan yang ada antara polisi nasional dan *gendarmerie*, dan aktor kemanusiaan yang bekerja dengan

korban KSBG dan TIP. Pada saat yang sama juga melatih pasukan keamanan, IOM bekerja dengan para walikota dari lima kabupaten Bangui, dan termasuk komunitas IDP, untuk mengidentifikasi 100 pendidik untuk dilatih di kesadaran KSBG pada tingkat masyarakat. Kursus pelatihan empat minggu dirancang untuk mengembangkan mekanisme *peer educator* berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan KSBG (IOM, 2016).

Sebuah *workshop* juga diadakan oleh Tearfund pada 30 Agustus 2017 di Bangui, Republik Afrika Tengah. Workshop tersebut dihadiri oleh 27 orang yang merupakan perwakilan dari Pemerintah, PBB, organisasi nasional dan internasional (Tearfund, 2017). Pada bulan Desember 2017, MSF (*Medecins Sans Frontieres*) membuka klinik untuk mendukung korban KSBG dan telah mengobati hampir 800 orang sejak saat itu. Dari jumlah tersebut, mayoritas adalah perempuan, dan seperempat adalah anak-anak (MSF, 2018).

Dengan latar belakang KSBG yang meningkat, pemerintah Republik Afrika Tengah meminta dukungan dari Uni Eropa (UE), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Bank Dunia untuk menyiapkan Pemulihan dan Peacebuilding Assessment (RPBA) untuk periode 2017–2021. Komitmen baru ini akan memainkan peran penting dalam memajukan Rencana Pemulihan dan Pembangunan Perdamaian Nasional 2017–2021 di Republik Afrika Tengah dan merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1983, yang menggarisbawahi pentingnya upaya bersama untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan menanggapi HIV dalam konflik dan pengaturan pasca-konflik (World Bank, 2018).